

Lampung Post

**Tribun Lampung**

Halaman

Radar Lampung

\_\_\_\_\_

15

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
				✓									



ISTIMEWA

**PREDIKAT WTP** - Bupati Tuba saat menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian di kantor BPK RI Perwakilan Lampung, Rabu (28/4).

## Sabet WTP Tujuh Kali Berturut-turut, Bupati Winarti: Jangan Jemawa

**MENGKALA, TRIBUN** Untuk ketujuh kalinya, Pemkab Tulangbawang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Lampung atas pengelolaan keuangan daerah.

Predikat WTP diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Lampung Andri Yogama kepada Bupati Winarti, di kantor BPK RI Lampung, Rabu (28/4).

Winarti menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Lampung atas predikat opini WTP yang ketujuh kalinya kepada Pemkab Tuba.

"Saya yakin BPK memiliki standar yang digunakan

secara tetap dalam undang-undang keuangan negara, yang disebut SPKN (standar pemeriksaan keuangan negara). Dan ini merupakan WTP yang ketujuh kali berturut-turut yang kami terima," ungkap Bupati Winarti, Kamis (29/4).

Kepada jajaran Pemkab Tuba, Winarti mengingatkan agar tidak jemawa atas predikat WTP yang diberikan BPK.

Sebaliknya, Winarti kembali mengingatkan bahwa predikat WTP itu mesti dijadikan pemicu kinerja, terutama terkait pengelolaan keuangan, agar lebih baik lagi ke depannya.

"Kita semua berharap manajemen pengelolaan

keuangan di Pemkab Tuba dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan akan semakin baik, akuntabel, transparan. Semua mesti dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun etika kewajaran," paparnya.

Dasar itu, kata Winarti, menjadi modal untuk melakukan pembangunan yang lebih baik di Tulangbawang, terutama dibidang infrastruktur.

Ketua BPK RI Perwakilan Lampung Andri Yogama berharap predikat WTP yang diberikan kepada Pemkab Tuba menjadi momentum untuk lebih mendorong ki-

nerja, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Ketua DPRD Tuba, Sopi'i, menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti terkait laporan hasil pemeriksaan dari BPK kepada Pemkab Tuba.

Menurut dia, selaku lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD akan terus mendorong dan mengawal proses tindak lanjut yang diamanatkan kepada Pemkab Tuba.

"Apakah itu bersifat saran, opini, maupun yang sifatnya pengembalian, akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," tandas Sopi'i. (ead)